

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 6

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan <input checked="" type="checkbox"/>	

## TAPD Paparkan Penggunaan Anggaran Covid-19 dan Pilkada

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (22/9) pagi, menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng. Salah satu agenda dalam rapat tersebut, mendengarkan pemaparan dari TAPD Kalteng, terkait anggaran penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 serta anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.



Wiyatno

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalteng H Jimmy Carter dan Hj Faridawaty Darland Atjeh, serta dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kalteng. Sementara itu dari TAPD

diwakili Asisten I Setda Kalteng Lies Fahima, Asisten II Nurul Edy dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakenda) Kalteng Nuryakin.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno mengatakan bahwa rapat tersebut selain membahas terkait anggaran Covid-19 dan pilkada, juga bertujuan untuk membahas strategi pencadangan anggaran untuk persiapan Tahun Anggaran (TA) 2021 mendatang. Dimana untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi refocusing anggaran yang berdampak pada terhambatnya sejumlah rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, TAPD Kalteng memapar-

kan dokumen perubahan Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan juga memaparkan anggaran pilkada serentak 2020.

Dari pemaparan tersebut, berdasarkan Pergub 27/2020, anggaran penanganan Covid-19 dialokasikan untuk penanganan kesehatan sekitar Rp57 miliar lebih, untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp171 miliar lebih dan untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp2,5 miliar lebih. Kemudian pada Perubahan V pada Pergub 41/2020, untuk penanganan kesehatan dan dampak ekonomi tidak mengalami kenaikan. Tetapi untuk JPS mengalami penurunan menjadi Rp164 miliar lebih.

Selanjutnya pada perubahan ke VI berdasarkan Pergub 47/2020 untuk JPS dan dampak ekonomi

juga tidak mengalami perubahan dan JPS kembali mengalami penurunan menjadi Rp131 miliar lebih.

Dengan adanya perubahan anggaran BTT tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Purman Jaya mengatakan bahwa dengan begitu maka akan ada Silpa anggaran.

“Dengan berkurangnya penggunaan anggaran pada Pergub 47, itu artinya kita ada cadangan khusus anggaran penanganan Covid-19 yang memang disediakan Rp500 miliar itu. Cadangan dana dari Covid-19 tahun 2020 itu terpakai kurang lebih Rp300 miliar sampai dengan R 350 miliar, ini artinya dari Silpa itu kemungkinan besar ditambah APBD murni bisa menjadi cadangan anggaran penanganan Covid-19 untuk tahun 2021 nanti,” kata Purman.  sgh